

UNIVERSITAS
NIAS



UNIAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya, setiap organisasi berusaha lebih baik dalam mencapai visi yang telah direncanakan baik untuk jangka pendek maupun jangka Panjang. Dalam aktivitas organisasi semua aspek seperti operasional teknis, sumber daya manusia dan keuangan harus berfungsi sebagai satu kesatuan kerja yang saling mendukung untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan organisasi, seetiap organisasi selalu berupaya Menyusun berbagai strategi sebagai panduan untuk meningkatkan efektivitass dan efisiensi kinerjanya. Anggaran menjadi rencana tertulis yang merinci kegiatan suantu instansi dalam periode tertentu. Anggaran merupakan suatu rencana tertulis tentang kegiatan suatu instansi yang dijelaskan secara terinci untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dalam satuan uang, tetapi dapat juga dijelaskan dalam bentuk satuan barang. Oleh sebab itu, anggaran berfungsi untuk mencapai tujuan dan dalam proses penyusunannya diperlukan data dan informasi, baik yang bersifat terkontrol maupun yang tidak terkontrol sebagai bahan estimasi.

Hal ini terjadi karena data dan informasi tersebut memengaruhi tingkat keakuratan estimasi dalam proses penyusunan anggaran. Di dalam sebuah organisasi, anggaran memiliki peran yang sangat penting sebagai rencana keuangan yang dirancang secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan organisasi. Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan keterbukaan dan tanggung jawab publik, setiap lembaga pemerintah diharuskan untuk memperbaharui dan meningkatkan performanya agar lebih fokus pada penciptaan pelayanan publik yang baik dan tata kelola yang baik.

Perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik adalah suatu dokumen yang menjelaskan kondisi

keuangan dari suatu organisasi seperti informasi tentang pendapatan, aktifitas dan belanja. Penganggaran sektor publik berhubungan dengan proses untuk menentukan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktifitas yang biasanya dalam satuan moneter.

Peningkatan efisiensi tidak hanya berdampak pada profitabilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan organisasi dengan pemborosan anggaran dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Dengan demikian, organisasi yang mampu mengimplementasikan praktik efisien akan memiliki keunggulan kompetitif, serta meningkatkan reputasi sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan fokus pada efisiensi, organisasi dapat mengoptimalkan proses operasional dan meningkatkan kepuasan kerja melalui pencapaian hasil yang lebih cepat dan berkualitas tinggi. Dengan strategi yang berfokus pada efisiensi juga dapat menciptakan peluang inovasi, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan kebutuhan dengan lebih baik dan mengembangkan pola kerja baru yang memenuhi ekspektasi tinggi. (Majid et al., 2023).

Anggaran pengeluaran mencakup seluruh kegiatan pengeluaran dari Kas Umum Negara atau Daerah yang berpengaruh pada pengurangan ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran yang relevan dan tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja daerah berfungsi untuk menandai pelaksanaan urusan penerimaan yang berlangsung ketika pengeluaran tersebut disetujui oleh unit yang memiliki tugas terkait keuangan. Belanja daerah berperan dalam mencirikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab provinsi serta kabupaten/kota, yang mencakup urusan yang wajib, pilihan, dan penanganannya dalam aspek atau bidang yang dapat dilakukan bersama oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara dalam hal ini Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat banyak. Menurut Chairil (2017), mengatakan bahwa Pelaksanaan anggaran merupakan tahap di mana sumber daya dimanfaatkan untuk menerapkan kebijakan tentang anggaran. Ada kalanya anggaran yang telah direncanakan dengan matang tidak dieksekusi dengan baik, tetapi tidak mungkin anggaran yang kurang terencana bisa dilaksanakan dengan baik. Proses persiapan anggaran yang efektif adalah langkah awal yang logis dan juga kronologis. Meski begitu, pelaksanaan menjadi rumit karena adanya sistem yang mengatur kepatuhan terhadap program yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun estimasi sudah dilakukan dengan baik, perubahan mendadak yang tidak terduga tetap akan terjadi di tahun yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam anggaran. Perubahan tersebut tentunya harus ditangani dengan cara yang selaras dengan tujuan utama agar aktivitas program dan kegiatannya tidak terhambat. Pengeluaran anggaran daerah seharusnya berlandaskan pada prinsip ekonomi yang wajar, efisiensi, dan efektivitas, maka sistem penganggaran diubah menjadi sistem yang berfokus pada kinerja. Dengan penerapan sistem anggaran yang fokus pada hasil, diharapkan anggaran daerah menjadi lebih jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat merancang anggaran daerah menggunakan pendekatan berbasis kinerja, penting untuk menetapkan indikator kinerja bagi setiap unit kinerja yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam beragam program dan aktivitas yang mudah diukur.

Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur perumahan dan pemukiman yang memadai. Namun dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan, seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang kompleks dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam demi efisiensi penggunaan keuangan, sehingga dibutuhkan identifikasi area yang

memerlukan perbaikan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan efisiensi anggaran (Widodo, 2019).

Anggaran dari pemerintah memiliki beberapa peran penting yaitu sebagai sarana perencanaan, sarana pengendalian, sarana kebijakan fiskal, sarana politik, sarana untuk koordinasi dan komunikasi, sarana evaluasi kinerja, sarana untuk memberikan motivasi, serta sarana untuk menciptakan ruang publik. Pengaturan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan rapi, mematuhi peraturan yang ada, efisien, efektif, jelas, dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan. Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan secara langsung maupun tidak langsung kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan untuk masyarakat.

Setiap organisasi, baik sektor publik maupun swasta, memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah, perencanaan tersebut diwujudkan melalui penyusunan anggaran sebagai instrumen utama untuk mendukung pelaksanaan program kerja. Anggaran bukan hanya merupakan rencana keuangan tahunan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan strategi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Pada era transparansi dan akuntabilitas publik saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk menunjukkan kinerja keuangan yang efisien, tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi diukur dari seberapa besar *output* yang dihasilkan dibandingkan dengan *input* yang dikeluarkan, serta sejauh mana penggunaan anggaran memberikan nilai manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab

besar dalam menyediakan infrastruktur dasar, khususnya di bidang perumahan dan pemukiman. Dengan tugas tersebut, unit ini mengelola anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan alokasi dana, birokrasi penganggaran yang kompleks, serta lemahnya sistem pengawasan internal yang dapat berdampak pada rendahnya efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023 dan 2024, total anggaran belanja yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 41,9 miliar. Namun realisasi anggarannya mencapai Rp39,49 miliar, atau sebesar 94,25%. Angka tersebut memang menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi, namun hal ini belum tentu menggambarkan efisiensi yang sebenarnya jika tidak diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap *input- output* dari pelaksanaan program- program yang dibiayai anggaran tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan dan Ayuningtyas (2010), efisiensi sektor publik baru dapat dinilai ketika rasio efisiensi melebihi satu dan memberikan hasil kerja dengan penggunaan sumber daya minimal. Maka dari itu, penting dilakukan pengkajian untuk memastikan apakah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara telah mengelola anggaran secara efisien dan apakah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan telah memberikan dampak yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selain itu, penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) menuntut adanya ukuran kinerja yang jelas dan indikator efisiensi yang terukur pada setiap unit kerja. Namun kenyataannya, dalam implementasinya seringkali tidak disertai dengan sistem evaluasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam untuk mengevaluasi efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara.

Realisasi anggaran belanja pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara selama 2 (dua) tahun anggaran tersebut, dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
|Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara 2023 - 2024

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi	Persentase (%)
2023	Rp.19.500.000.000,.	Rp. 17.650.000.000,.	90,51
2024	Rp. 22.400.000.000,.	Rp. 21.840.000.000,.	97,7
Total	Rp. 41.900.000.000,.	Rp. 39.490.000.000,.	94,25

Sumber: Dinas Perkakim Kab. Nias Utara, 2025

Tabel 1.1 tersebut di atas menggambarkan bahwa tingkat realisasi anggaran dibanding dengan anggaran belanja memiliki persentase yang cukup tinggi. Artinya, bahwa selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran yaitu 2023 dan 2024, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nias Utara telah melakukan penggunaan anggaran secara efisien sebesar 94,25%.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dalam menilai sejauh mana efisiensi keuangan telah dilaksanakan di satuan kerja tersebut, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan strategi peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara ilmiah dengan mengangkat judul: **“Analisis Efisiensi Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara”**.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis Analisis Efisiensi Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efisiensi Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara?

2. Apa saja faktor- faktor Efisiensi Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara?
3. Bagaimana realisasi pelaksanaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan adalah:

1. Untuk Efisiensi Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara.
2. Untuk Apa saja faktor- faktor efisiensi keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana realisasi pelaksanaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

a. Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur tentang efisiensi anggaran khususnya terkait dengan pelaksanaan program dan anggaran pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara.

b. Praktis

1. Bagi Penelitian

Dapat bermanfaat dalam menambahkan ilmu dan pengetahuan digunakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara untuk memahami aspek efisiensi keuangan dalam pelaksanaan program kerja.

2. Bagi Objek Penelitian

Hasil penelitian ini, di harapkan memberikan bahan kajian dalam pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan efisiensi keuangan.

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik dalam bidang pengelolaan keuangan, dan dalam penelitian ini juga di harapkan bermanfaat sebagai referensi dan

menambahkan koleksi dari kepustakaan khususnya di bagian skripsi Universitas Nias, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dan juga dapat di jadikan ferensi-refensi pada penelitian selanjutnya.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat di jadikan acuan bagi penelitian yang akan datang serta bertambahnya wawasan mengenai efisiensi keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara.

1.6 Pembaruan Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa arah pengembangan penelitian yang dapat dilakukan pada masa mendatang, antara lain:

1. Perluasan Objek Penelitian

Tidak hanya terbatas pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nias Utara, tetapi juga mencakup OPD lain atau kabupaten/kota berbeda agar hasilnya lebih dapat digeneralisasi.

2. Penggunaan Data Jangka Panjang

Penelitian dengan periode lebih panjang (lebih dari dua tahun) untuk melihat tren efisiensi secara mendalam.

3. Pendekatan Metode Campuran (Mixed Methods)

Mengombinasikan analisis kuantitatif dengan wawancara dari ASN, legislatif, dan masyarakat penerima manfaat agar hasil lebih objektif.

4. Penambahan Variabel

Penelitian Tidak hanya efisiensi keuangan, tetapi juga efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi untuk menilai kinerja keuangan secara lebih komprehensif.